



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

DINAS PERIKANAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



KATA PENGANTAR

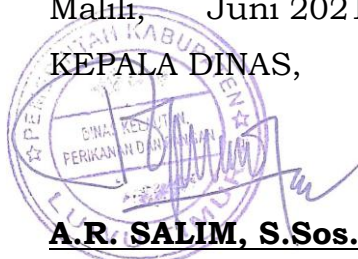
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga “Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sector kelautan dan perikanan tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari *stakeholder* dan instansi terkait lainnya dalam menyukkseskan pembangunan sector kelautan dan perikanan di daerah.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja ini dapat diselesaikan, maka disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juni 2021

KEPALA DINAS,



A.R. SALIM, S.Sos., MM.

Pkt : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip. 19651105 198703 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	iii
DAFTAR ISI-----	iii
DAFTAR TABEL -----	iv
 BAB I-----	 1
PENDAHULUAN-----	1
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Landasan Hukum -----	2
1.3. Maksud dan Tujuan-----	5
1.4. Sistematika Penulisan -----	6
 BAB II-----	 8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU-----	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD -----	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah -----	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD-----	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD-----	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan-----	29
 BAB III-----	 32
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH -----	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional-----	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD -----	33
3.3. Program dan Kegiatan -----	34
 BAB IV-----	 58
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH -----	58
 BAB IV-----	 63
PENUTUP -----	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 2.1	(T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	9
Tabel 2.2	Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II	14
Tabel 2.3	(T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur	23
Tabel 2.4	Isu Strategis yang Melingkupi Pelaksanaan Pelayanan Sektor Perikanan	24
Tabel 2.5	(T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	30
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022	49
Tabel 4.1	Alokasi Program dan Kegiatan serta Indikasi Pendanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, berisi gambaran umum kondisi daerah; gambaran keuangan daerah; permasalahan dan isu strategis daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; serta penetapan indikator kinerja daerah, wajib dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya.

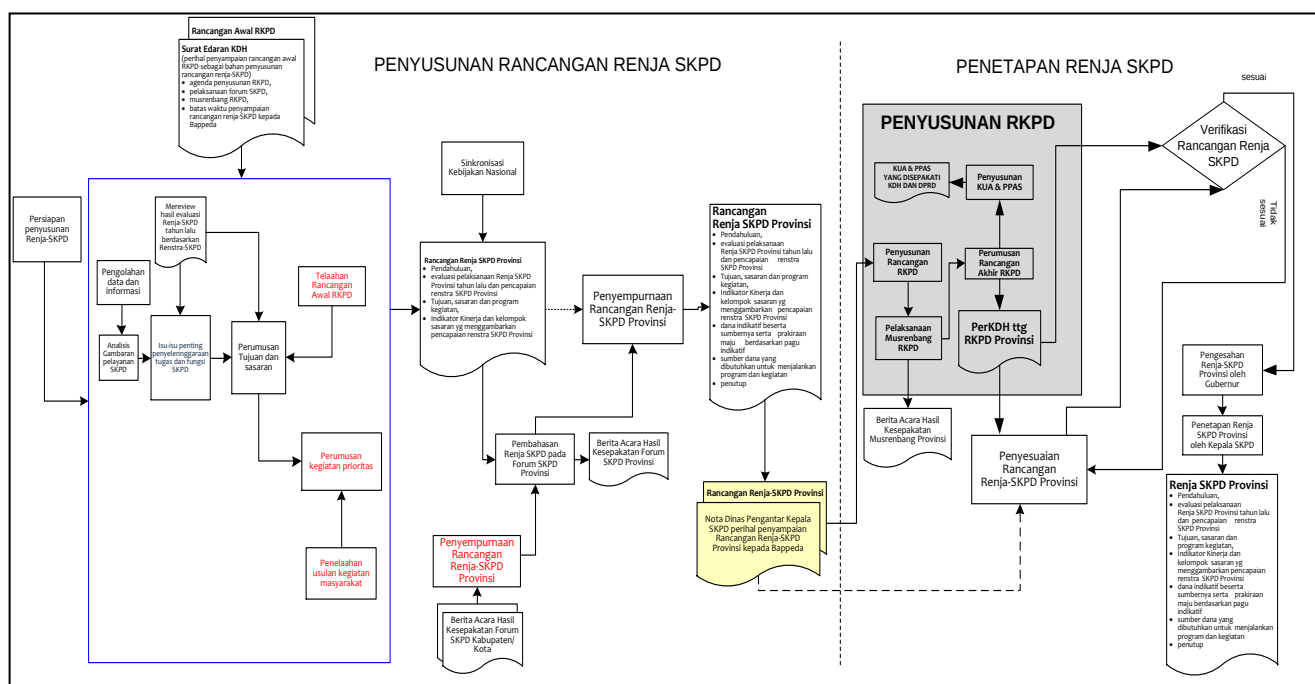
Rencana Pembangunan Tahunan OPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Rencana Kerja harus mengacuh pada Renstra OPD dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk satu tahun yang bersifat indikatif memuat kerangka makro sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dimana Dinas Kelautan, Perikanan

dan Pangan berubah nomenklatur OPD menjadi Dinas Perikanan. Prioritas pembangunan difokuskan pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD tahun 2022. Penyusunan Renja OPD harus mempertimbangan RKP Nasional, RKPD Propinsi dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 (Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rensta OPD ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD, KUA PPAS RKA Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2022;

3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan dalam satu tahun; dan
4. Membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
2. Terbangunnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan;
3. Menyediakan satu tolak ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.

Secara umum evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2020, dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja OPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Renja OPD setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2020 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan. Pada Tahun 2020 Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan melaksanakan 12 Program dan 45 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.500.582.758,39 atau sebesar 93,38 % dari

pagu anggaran sebesar Rp11.245.408.525,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp2.765.173.788,- atau sebesar 90,21 % dari pagu anggaran sebesar Rp3.065.127.300,- dan belanja langsung sebesar Rp7.735.408.970,- atau sebesar 94,56 % dari pagu anggaran sebesar Rp8.180.281.225,-. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1. (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2021 Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2	09	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata pencapaian indikator Kinerja Program SKPD	90 Persen	80	87	87	100
			01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terbit	2.000 Lembar	1,334	1.800	1,679	93.28
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air yang terbayarkan	36 Rekening	180	15	15	100
			06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan kantor yang terbayarkan dan jumlah jenis alat serta bahan pembersih yang diadakan	12 Jenis	14	12	12	127
			07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara	22 Unit	8	9	9	100
			08	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	80 Jenis	16	16	16	100
			09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	3 Jenis	8	7	7	100
			10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	10 Unit	12	11	11	100
			12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum	500 Orang	127	189	201	106.35
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	288 Exemplar	48	48	44	100
			16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	5 Jenis	1	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2021 Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
								Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	574 Kali	122	41	69	168.29
			19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga kerja pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	26 Orang	10	11	11	100
			21	Monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi triwulan yang disusun	4 Dokumen	4	4	4	100
			22	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	500 Orang	478	244	252	133
2	09	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	90 Persen	80	87	87	100
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	35 Unit	2	0	0	0
			12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	55 Unit	5	2	2	100
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	8	3	3	100
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	21 Unit	21	23	23	100
2	09	01	04	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	90 Persen	80	85	85	100
			03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan, bimtek, dan diklat	25 Orang	10	2	2	100
2	09	01	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan	90 Persen	80	85	85	100
			06	Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg disusun	5 Dokumen	1	1	1	100
			08	Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun yang disusun	5 Dokumen	2	2	2	100
2	09	01	06	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan	95 Persen	80	90	90	100
			01	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yg disusun	36 Dokumen	6	6	6	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2021 Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
								Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2	09	01	17	Program pengembangan distribusi dan harga pangan	Presentase pemenuhan pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah	98 Persen	0	95	95	100
			02	Pengembangan dan pengelolaan informasi harga pangan strategis	Jumlah Dokumen informasi harga pangan	20 Dokumen	4	4	4	100
			04	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Jumlah gapoktan pengembangan model distribusi pangan yang efisien (PLDPM) yang dibina	48 Kelompok	4	5	5	100
2	09	01	20	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan Dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok /beras	595	554	568	245,40	43,20
			01	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten setara beras	8.000 Kg	3.000	3.000	3.000	100
			02	Pengembangan lumbung pangan Desa dan sarana pendukungnya	Jumlah lumbung pangan dan lantai jemur yang dibangun	18 Unit	3	2	2	100
			03	Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen NBM yang dihasilkan	6 Dokumen	1	1	1	100
			07	Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	90 Persen	66	0	0	100
			08	Pendampingan Ketahanan Pangan	Gapoktan/Kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan /APBN/APBD I (Gapoktan/Kelompok)		89	8	8	100
2	09	01	21	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Keamanan Pangan	Persentase Komoditi Pangan Segar yang aman	90 Persen	85	98	98	100
			01	Penyusunan dan analisis pola pangan harapan (PPH)	Nilai skor PPH	90 skor	90	90	90	100
			03	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah sample bahan/asal pangan terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	66 Varietas	10	0	0	0
			04	Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah Frekuensi pelaksanaan kegiatan lomba cipta menu pangan lokal tingkat Kab. Propinsi dan Nasional	12 Kali	3	0	0	0
			05	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Frekuensi pelaksanaan kegiatan pengolahan pangan lokal di tingkat klp wanita tani	64 kali	16	0	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2021 Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
								Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
					dan sekolah dasar					
2	09	01	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	925 Orang	285	150	160	106
			02	Pendampingan sertifikasi nelayan	Jumlah nelayan yg difasilitasi sertifikasi lahan	600 Persil	100	50	100	200
			03	Peningkatan keterampilan/kapasitas pelaku utama perikanan	Jumlah Nelayan Purse Saine yang dilatih	300 Orang	0	0	0	0
			04	Pembinaan desa pesisir dalam pelestarian sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pomawas) desa pesisir yang aktif	16 Kelompok	16	10	10	100
			05	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan perikanan	Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan hukum	360 Orang	60	30	30	100
2	09	01	20	Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	310.800	309.746	309.950	312,754	100
			01	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah benih ikan unggul yang tersalurkan	280.000 Ekor	51.400	40.000	24,300	60.75
			02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan /APBN/APBD I	120 Kelompok	20	16	16	100
			04	Pengawasan dan pengendalian hama penyakit ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan informasi hama dan penyakit ikan dengan memperhatikan kesetaraan gender	230 Orang	30	30	30	100
			05	Pengembangan sarana produksi budidaya ikan / rumput laut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan paket Budidaya Ikan	80 Kelompok	32	30	30	94,11
			06	Pembangunan dan Pengerasan jalan produksi Tambak	Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun	100 Km	27	13	14	107.69
			07	Pembangunan jembatan tambak dan plat decker	Jumlah jembatan tambak yang dibangun	25 Unit	4	0	0	0
			08	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana budidaya	Jumlah Prasarana yang direhab/dibangun	3 Unit	3	0	0	100
			09	Pendampingan sertifikasi lahan tambak	Jumlah persil lahan pembudidaya ikan disertifikatkan	250 Persil	180	0	0	0
			12	Penyusunan data statistik perikanan	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu	20 Dokumen	12	12	12	100
2	09	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	8.875 Ton	9.993	8.875	8.915	100
			01	Pendampingan pada	Jumlah nelayan yg mendapatkan	68 Kelompok	12	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2021 Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
	kelompok Nelayan perikanan tangkap	Pendampingan					
	02 Pembangunan tempat pelelangan ikan	Jumlah tambatan perahu/TPI/fasilitas pokok TPI yg dibangun/direhab	9 Unit	5	0	0	100
	07 Pengembangan sarana prasarana penangkapan ikan	Jumlah bantuan mesin katinting/ mesin tempel yang disalurkan	400 Unit	93	100	168	168
2 09 01 23	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan perikanan yang beroperasi	3	3	3	3	100
	02 Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah sarana prasarana industri perikanan yang dibangun/direhab	9 Unit	3	1	1	100
	03 Pembinaan dan pengembangan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah kelompok usaha perikanan yang dibina	71 Kelompok	4	3	3	100
	04 Penyediaan keikutsertaan expo/ promosi dan pameran produk perikanan	Jumlah pengembangan promosi dan pameran produk hasil perikanan dan pangan	26 Kali	6	3	6	200

Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dengan Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran diperoleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

$x \geq 85$	: Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	: Berhasil
$55 \leq x < 70$	: Cukup Berhasil

x < 55 : Kurang Berhasil

Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya produksi perikanan tangkap budidaya dan diversifikasi hasil perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	8.918 Ton	10.012,71 Ton	112,28 %	Sangat Berhasil
		Jumlah produksi perikanan budidaya	311.493 Ton	315.343 Ton	101,24 %	Sangat Berhasil
		Jumlah produksi pengolahan ikan	308 Ton	311,5 Ton	101,13 %	Sangat Berhasil
II	Tersedianya pangan strategis	Jumlah ketersediaan komoditi pangan strategis	245.401 Ton	252.728,82 Ton	102, 99 %	Sangat Berhasil
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Lakip	B	B (65,69)	100 %	Sangat Berhasil

Secara umum program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada dua tujuan dengan dua sasaran utama dan satu sasaran pendukung yang ditetapkan, diperoleh rata-rata capaian di atas 100 % sehingga dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Diversifikasi Hasil Perikanan

Indikator Kinerja 1 : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditahun 2020 adalah sebesar Rp2.291.197.100,-. Realisasi anggaran sebesar Rp2.001.403.628,- atau 87,35 %.

1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 melebihi dari target produksi yang di rencanakan sebesar 12,28%. Perbandingan antara target produksi dan realisasi produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.918	10.012,71	112,28 %
Persentase Capaian Rata – rata			112,28 %

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut yaitu nilai capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran rata-rata adalah lebih dari 100 % dengan kategori **Sangat Berhasil**.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.993	9.995	10.012,71

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu pemicu sehingga hasil perikanan tangkap dapat meningkat karena adanya bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat

pembantu penangkapan ikan yang disalurkan ke masyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat.

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target Renstra digambarkan pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.995	10.012,71	10.013

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional digambarkan pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Standar Provinsi	Standar Nasional
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	10.012,71	398.565,23	8.200.000

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 10.012,71 atau 3 % terhadap target pencapaian produksi perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 398.565,23 sedangkan untuk pencapaian target nasional Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 0,12 %.

Indikator Kinerja 2 : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran untuk meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di tahun 2020 adalah sebesar Rp3.588.329.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp3.562.275.800,- atau 99,27 %.

2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pencapaian produksi budidaya pada tahun 2020 melebihi dari target produksi sebesar 1,24 %. Perbandingan antara target produksi dan realisasi produksi dengan indikator kinerja yaitu jumlah produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	311.493	315.343	101,24 %
Persentase Capaian Rata – rata			101,24 %

2.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	309,746	315,278	315,343

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya menunjukkan peningkatan di tahun 2020, ini dipicu oleh adanya perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya akan menjanjikannya usaha budidaya baik itu budidaya air payau dan air tawar, serta adanya sarana dan prasarana pembudidaya yang salurkan pada masyarakat.

2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

Bila dilihat perbandingan antara realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2020 dengan target Renstra tahun 2021 menunjukkan realisasi tahun 2020 lebih besar dibanding

target Renstra 2021. Hal ini terjadi karena produksi tahun 2020 lebih besar dari target karena tingginya animo masyarakat pada budidaya rumput laut. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target renstra dapat dilihat pada table berikut ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	315.278	315.343	315.345

2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Standar Provinsi	Standar Nasional
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	315.343	4.868.268,8	18.440.000

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 315.343 atau 6,5 % terhadap target pencapaian produksi perikanan budidaya Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4.868.268,8. Sedangkan untuk pencapaian target nasional Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 1,7 %.

Indikator Kinerja 3 : Jumlah Produksi Pengolahan Ikan

Indikator tiga pada Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan adalah Jumlah Produksi Pengolahan Ikan. Indikator tersebut dibebankan pada Bidang Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan. Alokasi anggaran untuk meningkatkan Jumlah Produksi Pengolahan Ikan di tahun 2020 adalah sebesar Rp556.469.725,-. Realisasi anggaran sebesar Rp544.179.501,73 atau 97,79 %.

3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pencapaian produksi pengolahan hasil perikanan pada tahun 2020 melebihi dari target produksi sebesar 1,14 %. Perbandingan antara target produksi dan realisasi produksi pada indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Pengolahan Ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produksi pengolahan Ikan (ton)	308	311,5	101,14 %
Persentase Capaian Rata – rata			101,14 %

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Jumlah Produksi pengolahan Ikan (ton)	312	311,8	311,5

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Jumlah Produksi Pengolahan Ikan menunjukkan adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan di tahun 2018. Pada saat itu, jumlah kelompok pengolahan rumput laut dan terasi meningkat namun terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020. Hal ini dipicu oleh adanya beberapa kelompok pengolahan hasil perikanan yang mengurangi hasil produksi olahannya akibat pemasaran hasil olahannya mengalami kendala.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Jumlah Produksi pengolahan Ikan (Ton)	311,8	311,5	312

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Standar Provinsi	Standar Nasional
Jumlah Produksi pengolahan Ikan (ton)	311,5	-	-

Sasaran II : Tersedianya pangan strategis

Indikator Kinerja 4 : Jumlah ketersediaan komoditi Pangan Strategis

Istilah rawan pangan (*food insecurity*) merupakan kondisi kebalikan dari ketahanan pangan (*food security*) dimana suatu rumah tangga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kalori minimal yang dibutuhkan oleh anggota rumah tangganya.

Kerawanan pangan merupakan isu multidimensional yang memerlukan analisis dari berbagai parameter yang tidak hanya produksi dan ketersediaan pangan saja. Meskipun tidak ada secara spesifik untuk mengukur ketahanan pangan, kompleksitas ketahanan pangan dapat disederhanakan dengan menitikberatkan pada tiga dimensi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu ketersediaan pangan dan akses pangan oleh rumah tangga dan

pemanfaatannya. Alokasi anggaran untuk meningkatkan ketersediaan komoditi pangan strategis di tahun 2020 sebesar Rp770,656,000. Realisasi anggaran sebesar Rp719,337,085.75 atau 93,34 %.

4.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rasio Ketersediaan Komoditi Pangan Strategis pada tahun 2020 melebihi dari target sebesar 2,99 %. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yaitu Jumlah Ketersediaan Komoditi Pangan Strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Ketersediaan komoditi Pangan Strategis (Ton)	245.401	252.728,82	102,99 %
Persentase Capaian Rata – rata			102,99 %

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Ketersediaan komoditi Pangan Strategis (Ton)	259,389	245,401	252.728

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Ketersediaan Komoditi Pangan Strategis menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2020, ini dipicu oleh adanya peningkatan jumlah produksi meningkat.

4.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target Renstra digambarkan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021
Ketersediaan komoditi Pangan Strategis (Ton)	245,401	252,728	252,728

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agroindustri yang berbasis sumber daya lokal dan pasar global. Selain itu, pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan merupakan implementasi dari Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

Analisis kinerja pelayanan OPD berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendagri 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan IKK sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)			645.223	655.256	665.289	675.323	685.356							
2	Nilai Produksi Perikanan (Rupiah)			754 M	769 M	774 M	779 M	782 M							
3	Rata-Rata Capaian IKK dan Program (Persen)			90	90	90	90	90							
4	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			B	BB	BB	A	A							

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pergantian Nomenklatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan menjadi Dinas Perikanan dan pelayanan publik (*public service*) serta tanggung jawab (akuntabilitas) dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Beberapa isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor kelautan dan perikanan tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4. Isu Strategis yang Melingkupi Pelaksanaan Pelayanan Sektor Perikanan

Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI				
	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
1	Penurunan Stok Ikan	Kesenjangan Gender/akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya Produktivitas dan daya saing usaha Perikanan	Berdasarkan Perda Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan akan menjadi Dinas Perikanan sedangkan Pangan akan bergabung dengan Dinas Pertanian
2	Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut)	
3	Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang.	Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang.	

Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI				
	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
4	Masih maraknya IUU Fishing di wil pesisir & perairan pedalaman	Pemahaman masyarakat tentang penanganan Mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal	
5	Hama dan penyakit udang/ikan/Rumput Laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah.	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas	
6	Degradasi dan kerusakan lingkungan		Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	
7	Adanya Wabah Virus Covid 19			

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. **Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah:

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- b. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan perikanan;

- d. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- e. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- f. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;
- g. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur; dan
- h. Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara internal/bersifat ke dalam. Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah:

- a. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas;
- c. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan;
- e. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik manajerial, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;

- f. Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi; dan
- g. Masih ditemukannya budaya kerja pegawai/Pegawai ASN yang bekerja menunggu perintah atasan dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Peluang (*Opportunity*)

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good government*) serta pemerintahan yang bersih (*clean governance*);
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar Pegawai ASN berdisiplin dan professional;
- c. Adanya komitmen untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan *good governance*;
- d. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan;
- f. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berwawasan global; dan
- g. Tersedianya jaringan internet *online* di semua OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

4. Tantangan (*Threat*)

Adapun tantangan yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dan perkembangan teknologi dan permasalahan di masyarakat yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat;
- c. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat perikanan;
- d. Semakin terbukanya akses *stakeholder* guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- e. Kurangnya tingkat partisipasi *stakeholder* di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur; dan
- f. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2022, tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang memuat program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi misi Bupati.

Pertimbangan dan analisis kebutuhan berdasarkan hasil Musrenbang dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan, dapat disajikan pada Lampiran I tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Sinkronisasi program prioritas Dinas Perikanan yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut:

1. Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh Tim Perencanaan Daerah (Bapelitbangda) yang kemudian oleh Dinas Perikanan diperjelas dalam bentuk **program prioritas dengan indikator keluaran/sasaran dan pagu indikatif yang jelas**;
2. Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing Bidang di Dinas Perikanan akan menjadi bahan diskusi dalam Musrenbang Kecamatan untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten;
3. Hasil Musrenbang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya; dan
4. Pokok-pokok Pikiran DPRD juga menjadi bahan pertimbangan penyusunan Renja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah proses sosialisasi perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang dan berlangsung hanya sehari, sehingga waktu untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa/kecamatan dan kabupaten/DPRD sebagai pemegang kendali kebijakan eksekutif/legislatif tidak bisa berjalan secara optimal. Mekanisme perencanaan melalui Musrenbang secara berjenjang yang bahkan dilengkapi dengan reses yang dilakukan oleh para legislator masih belum mampu mengakomodir keinginan atau kebutuhan masyarakat.

Kendala lain pengumpulan informasi pada Musrenbang Tingkat Kabupaten yaitu usulan-usulan yang diajukan terlalu mikro dan lebih dominan pada pembangunan fisik. Disamping itu sering ditemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang berani mengutarakan pendapat hanya segelintir orang.

Telaahan terhadap usulan program yang diajukan oleh pemangku kepentingan melalui kegiatan Musrenbang Tahun 2022 dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dapat dievaluasi bahwa beberapa kegiatan yang diusulkan pada umumnya bersifat permintaan bantuan langsung berupa sarana produksi perikanan budidaya maupun sarana produksi perikanan tangkap yang tidak dibarengi dengan usulan dalam bentuk proposal. Sesuai ketentuan Permendagri 32 Tahun 2010 yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Tabel 2.5. (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa (Lakawali, Lampenai, Tadulako)	Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun (Km)	3 Paket	Memudahkan masyarakat petani tambak dalam mobilisasi hasil budidaya
2		Desa Tampinna	Jumlah jembatan tambak yang disediakan (unit)	1 Unit	
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa (Lauwo, Balo-Balo, Mabonta, Bawalipu, Lampenai)	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidayaan ikan yang tersedia (klp)	5 Paket	Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat petani tambak untuk meningkatkan hasil produksi budidaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
4	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa (Lampenai, Balo-Balo)	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehab	2 Unit	Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam mobilisasi dan pemasaran hasil tangkapan
5	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa (Lampenai, Rinjani, Lakawali, Tokalimbo)	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang disediakan (kelompok)	7 Paket	Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat nelayan untuk memperbaiki alat tangkap sehingga meningkatkan hasil tangkapan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur secara teknis mengacu pada **arah** kebijakan pembangunan Nasional dan arah kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada:

1. Prioritas Pembangunan Nasional sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat empat major *project* terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan;
- b. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
- c. Integrasi Pelabuhan Perikanan; dan
- d. Pasar Ikan (*Fish Market*) Bertaraf Internasional.

2. Prioritas Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi

Adapun prioritas sasaran jangka menengah pada Renstra Provinsi Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- a. Peningkatan produksi perikanan;
- b. Peningkatan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c. Peningkatan ekspor hasil perikanan;
- d. Nilai tambah produk olahan;
- e. Pendapatan perkapita nelayan dan pembudidaya; dan
- f. Jumlah tenaga kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pelaksanaan perencanaan kerja Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan difokuskan kepada pencapaian target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Renstra SKPD.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi.

Adapun tujuan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; dan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan, semesteran dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang diharapkan dalam pencapaian tujuan Renja Dinas Perikanan sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas sektor perikanan; dan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan keuangan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama periode 2021-2026, maka ditetapkan program dan kegiatan Renja Tahun 2022 yang terkait erat dalam upaya pencapaian pembangunan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan pada tahun 2022 yaitu termuat dalam lima program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan, terdiri dari:

1. Bidang Perikanan Tangkap

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi terutama dari hasil tangkapan nelayan. Indikator program ini adalah produksi perikanan tangkap (ton). Untuk mencapai target program tersebut, maka dilakukan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Sedangkan indikator kegiatan ini adalah cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap.

- 1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen data dan informasi sumber daya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen);

- 1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran yaitu tersedianya tambatan

- perahu. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehab (unit); dan
- 1.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran yaitu tersedianya sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (KP 1) (kelompok).
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran yaitu meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil. Indikator kegiatan ini adalah cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan.
 - 2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dengan sasaran yaitu meningkatnya pengetahuan dan kemampuan nelayan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (kelompok);
 - 2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, dengan sasaran yaitu meningkatnya pengetahuan dan kemampuan nelayan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok); dan
 - 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, dengan sasaran yaitu adanya lahan nelayan yang disertifikatkan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (persil).
 - 3) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan sasaran yaitu terwujudnya

tempat pelelangan ikan yang operasional. Indikator kegiatan ini adalah cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar.

3.1. Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan sasaran yaitu tersedianya fasilitas TPI/fasilitas pokok PPI. Indikator kegiatan ini adalah jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit).

b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator program ini adalah persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (persen). Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan dan sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Pengawasan Sumber daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan sasaran meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan. Indikator kegiatan ini adalah cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif.

1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan sasaran terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali).

2. Bidang Perikanan Budidaya

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan mendukung program prioritas Pemerintah. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya.

Program tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri strategis perikanan di Kabupaten Luwu Timur dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar di daerah. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan dan perluasan jejaring dan kemitraan.

Indikator program ini adalah jumlah produksi perikanan budidaya (ton). Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan sasaran yaitu terpenuhinya pemberdayaan seluruh pembudidaya ikan kecil. Indikator kegiatan ini adalah Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen).
 - 1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pembudidaya. Indikator

sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan (kelompok);

1.2. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, dengan sasaran adanya lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan (persil); dan

1.3. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan sasaran terpenuhinya kelompok pembudidaya yang mendapatkan pendampingan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/APBD (kelompok).

2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan. Indikator kegiatan ini adalah cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan.

2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran tersedianya dokumen data dan informasi pembudidaya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (dokumen);

2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan tiga sasaran yaitu tersedianya prasarana BBI, tersedianya jembatan tambak, dan tersedianya jalan

produksi tambak. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab (unit), jumlah jembatan tambak yang disediakan (KP 1) (unit), dan jumlah panjang jalan produksi tambak yang dibangun dan di tingkatkan (KP 1) (km);

2.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran tersedianya benih unggul serta sarana pembudidaya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (KP 1) (kelompok);

2.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran meningkatnya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang); dan

2.5. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat, dengan sasaran tersedianya bibit unggul. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor).

3. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

a. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha terhadap industri-industri pengelolaan hasil perikanan sehingga dapat menjadi pusat pelayanan dari industri. Industri yang dimaksud yaitu industri pengolahan rumput laut, udang

dan ikan. Kegiatan-kegiatan ini juga meliputi pengadaan dan pembangunan sarana prasarana, pembinaan diversifikasi hasil perikanan dan optimalisasi pemasaran. Indikator program ini adalah jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (ton).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran terdaftarnya usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil. Indikator kegiatan ini adalah cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP).

1.1. Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran tersedianya dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen).

- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran meningkatnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan. Indikator kegiatan ini adalah persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen).

2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan

atau standar usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali).

- 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran yaitu tersedianya bahan baku industri pengolahan. Indikator kegiatan ini adalah persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen).

3.1. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran yaitu tersedianya sarana pengolahan ikan, dan tersedianya prasarana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok/pelaku usaha perikanan yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (kelompok).

4. Kesekretariatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program ini memiliki sasaran meningkatnya pelayanan penunjang urusan perangkat daerah, dengan indikator persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah

terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (persen).

- 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen perencanaan dan indikator yaitu jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen);
- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen RKA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen);
- 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen);
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen DPA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen);
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen); dan
- 1.6. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen

evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah dan indikator jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen).

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah dan indikator yaitu persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen).

- 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan sasaran adalah meningkatnya kesejahteraan ASN dan indikator yaitu jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang); dan

- 2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen).

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi BMD pada perangkat daerah dan indikator adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (persen).

- 3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen laporan penatausahaan BMD dan indikator yaitu jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (dokumen).

- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dan indikatornya adalah persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (persen).
 - 4.1. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah dan indikatornya adalah jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen).
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen).
 - 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan sasaran adalah tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan indikatornya adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel);
 - 5.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran adalah tersedianya laporan data administrasi kepegawaian dan indikatornya adalah Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (laporan);
 - 5.3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan

- pegawai dan indikatornya adalah jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi (orang);
- 5.4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dan indikatornya adalah jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang); dan
- 5.5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dan indikatornya adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang).
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen).
- 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan sasaran yaitu tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan indikatornya adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis);
- 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan sasaran adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan indikatornya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit);

- 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan sasaran adalah tersedianya bahan logistik kantor dan indikatornya adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis);
 - 6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan sasaran adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan indikatornya adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksemplar);
 - 6.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan sasaran adalah tersedianya makan dan minum tamu dan indikatornya adalah jumlah tamu yang difasilitasi (orang); dan
 - 6.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sasaran adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan indikatornya adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali).
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah dan indikatornya adalah persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (persen).
- 7.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran adalah tersedianya kendaraan dinas dan indikatornya adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit);

- 7.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan sasaran adalah tersedianya mebel dan indikatornya jumlah mebel yang diadakan (unit); dan
- 7.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya dan indikatornya adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit).
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (persen).
 - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan sasaran adalah teradministrasinya surat masuk dan keluar dan indikatornya adalah jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat);
 - 8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan sasaran adalah tersedianya rekening telepon, listrik dan air dan indikatornya adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening); dan
 - 8.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan sasaran adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor dan indikatornya adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat

daerah, dan indikatornya adalah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (persen).

- 9.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan indikatornya adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit);
- 9.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan sasaran adalah terpeliharanya mebel dan indikatornya adalah jumlah mebel yang dipelihara (unit);
- 9.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dan indikatornya adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit); dan
- 9.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan sasaran yaitu terpeliharannya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya dan indikatornya adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit).

Untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA				11.945.440.459			13.624.133.401
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11.945.440.459			8.015.005.525
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.226.920.143			8.015.005.525
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Perikanan	10.165,90	3.374.525.525		10.216,90	2.184.225.525
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	Dinas Perikanan	100	2.688.577.160		100	1.822.877.160
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen)	Dinas Perikanan	1	22.877.160		1	22.877.160
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap (unit)	Kecamatan	2	2.600.000.000		2	400.000.000
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (kelompok) KP 1	Kecamatan	15	65.700.000		15	1.400.000.000
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	Kecamatan	100	161.348.365		100	161.348.365
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (kelompok)	Kecamatan	20	76.105.295		20	76.105.295

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok)	Kecamatan	12	69.922.525		12	69.922.525
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (persil)	Kecamatan	80	15.320.545		80	15.320.545
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	Kecamatan	57	524.600.000		71	200.000.000
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit)	Kecamatan	1	524.600.000		1	200.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Kecamatan	315.565	3.268.093.513		315.710	4.500.000.000
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen))	Kecamatan	60	162.308.033		70	210.000.000
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	Kecamatan	30	53.910.430		30	100.000.000
3.25.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan (persil)	Kecamatan	100	17.265.783		50	10.000.000
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD (kelompok)	Kecamatan	30	91.131.820		30	100.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	Kecamatan	100	3.105.785.480		100	4.290.000.000
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (dokumen)	Dinas Perikanan	4	195.446.000		4	200.000.000
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana di BBI yang di bangun/rehab (unit)	Kecamatan	3	300.000.000		3	460.000.000
		Jumlah Jembatan tambak yang disediakan (unit) (KP 1)	Kecamatan	3	400.000.000		4	800.000.000
		Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun dan ditingkatkan (Km) (KP 1)	Kecamatan	5	500.000.000		6	600.000.000
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (kelompok) (KP1)	Dinas Perikanan	20	1.500.000.000		20	2.000.000.000
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang)	Kecamatan	30	44.174.875		30	50.000.000
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor)	Kecamatan	80.000	166.164.605		90.000	180.000.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	Kecamatan	94	74.000.000		96	50.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	Kecamatan	100	74.000.000		100	50.000.000
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali)	Kecamatan	24	74.000.000		24	50.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi hasil pengolahan ikan (ton)	Kecamatan	322	510301.105		335	1.280.780.000
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	Kecamatan	100	238.538.050		100	350.530.000
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	Kecamatan	4	238.538.050		4	350.530.000
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)	Kecamatan	83	86.925.550		83	140.250.000
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali)	Kecamatan	5	86.925.550		5	140.250.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)	Kecamatan	55	184.837.505		64	790.000.000
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	Kecamatan	5	184.837.505		5	240.000.000
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (persen)	Dinas Perikanan	100	4.718.520.316		100	5.609.127.876
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (persen)	Dinas Perikanan	100	74.922.874		100	88.800.000
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	Dinas Perikanan	2	29.478.533		2	32.000.000
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	Dinas Perikanan	1	3.500.000		1	4.200.000
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	Dinas Perikanan	1	3.500.000		1	3.700.000
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	Dinas Perikanan	1	4.000.000		1	3.700.000
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	Dinas Perikanan	1	4.000.000		1	4.200.000
3.25.01.2.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	Dinas Perikanan	10	30.444.341		10	41.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen)	Dinas Perikanan	100	3.222.259.876		100	3.887.627.876
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	Dinas Perikanan	31	3.152.114.386		31	3.813.482.386
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	Dinas Perikanan	18	70.145.490		18	74.145.490
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (persen)	Dinas Perikanan	100	21.894.801		100	22.000.000
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (dokumen)	Dinas Perikanan	4	21.894.801		4	22.000.000
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (persen)	Dinas Perikanan	100	6.841.245		100	7.000.000
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen)	Dinas Perikanan	4	6.841.245		4	7.000.000
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas Perikanan	100	132.150.920		100	156.000.000
3.25.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	Dinas Perikanan	-	37.900.000		50	40.000.000
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	Dinas Perikanan	12	24.910.920		12	26.000.000
3.25.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Perikanan	7	23.750.000		7	30.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tugas dan Fungsi	(orang)						
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	Dinas Perikanan	7	23.040.000		7	30.000.000
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	Dinas Perikanan	7	22.550.000		7	30.000.000
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	Dinas Perikanan	100	411.034.475		100	481.700.000
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Perikanan	12	6.832.575		12	7.000.000
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	Dinas Perikanan	4	3.000.000		4	3.000.000
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Perikanan	21	3.841.900		21	4.000.000
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	Dinas Perikanan	4	7.660.000		4	8.000.000
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	Dinas Perikanan	48	6.100.000		48	6.100.000
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	Dinas Perikanan	160	3.600.000		160	3.600.000
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Dinas Perikanan	200	380.000.000		200	450.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (persen)	Dinas Perikanan	100	434.056.125		100	536.000.000
3.25.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	Dinas Perikanan	-	400.378.725		1	500.000.000
3.25.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	Dinas Perikanan	2	8.200.000		2	10.000.000
3.25.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	Dinas Perikanan	4	25.477.400		4	26.000.000
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	Dinas Perikanan	100	299.660.000		100	314.300.000
3.25.01.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	Dinas Perikanan	2.000	3.060.000		2.000	3.500.000
3.25.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	Dinas Perikanan	10	140.000.000		10	154.200.000
3.25.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	Dinas Perikanan	8	156.600.000		8	156.600.000
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (persen)	Dinas Perikanan	100	115.700.000		100	115.700.000
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	Dinas Perikanan	23	74.210.000		23	74.210.000
3.25.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	Dinas Perikanan	5	2.500.000		5	2.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Dinas Perikanan	5	13.990.000		5	13.990.000
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Dinas Perikanan	3	25.000.000		3	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2022 Dinas Perikanan direncanakan melaksanakan lima program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp13.294.341.451,-. Alokasi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Alokasi Program dan Kegiatan serta Indikasi Pendanaan
Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)		
			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	5	6	
	BELANJA			11.945.440.459	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.945.440.459	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.226.920.143	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	10.165,90	3.374.525.525	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100	2.688.577.160	
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen)	1	22.877.160	DAU
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap (unit) KP 1	2	2.600.000.000	DAU
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (kelompok) KP 1	15	65.700.000	DAU
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100	161.348.365	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (kelompok)	20	76.105.295	DAU
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok)	12	69.922.525	DAU
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (persil)	80	15.320.545	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)		
			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	5	6	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	57	524.600.000	
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit)	1	524.600.000	DAU
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315.565	3.268.093.513	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen))	60	162.308.033	
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	30	53.910.430	DAU
3.25.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan (persil)	100	17.265.783	DAU
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD (kelompok)	30	91.131.820	DAU
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100	3.105.785.480	
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (dokumen)	4	195.446.000	DAU
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana di BBI yang dibangun/rehab (unit)	3	300.000.000	DAU
		Jumlah Jembatan tambak yang disediakan (unit) (KP 1)	3	400.000.000	DAU
		Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun dan ditingkatkan (Km) (KP 1)	5	500.000.000	DAU
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (kelompok) (KP1)	20	1.500.000.000	DAU
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang)	30	44.174.875	DAU
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor)	80.000	166.164.605	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)		
			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	5	6	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	94	74.000.000	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100	74.000.000	
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali)	24	74.000.000	DAU
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi hasil pengolahan ikan (ton)	322	510.301.105	
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100	238.538.050	
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	4	238.538.050	DAU
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)	83	86.925.550	
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali)	5	86.925.550	DAU
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)	55	184.837.505	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	5	184.837.505	DAU
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (persen)	100	4.718.520.316	
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (persen)	100	74.922.874	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	29.478.533	DAU
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	1	3.500.000	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)		
			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	5	6	
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	3.500.000	DAU
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	1	4.000.000	DAU
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	4.000.000	DAU
3.25.01.2.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	30.444.341	DAU
3.5.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen)	100	3.222.259.876	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	31	3.152.114.386	DAU
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	70.145.490	DAU
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (persen)	100	21.894.801	
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (dokumen)	4	21.894.801	DAU
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (persen)	100	6.841.245	
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen)	4	6.841.245	DAU
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	132.150.920	
3.25.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	-	37.900.000	
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	24.910.920	DAU
3.25.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi (orang)	7	23.750.000	DAU
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	7	23.040.000	DAU
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	7	22.550.000	DAU
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	411.034.475	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)		
			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	5	6	
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	12	6.832.575	DAU
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	4	3.000.000	DAU
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	21	3.841.900	DAU
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	4	7.660.000	DAU
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	48	6.100.000	DAU
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	160	3.600.000	DAU
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	200	380.000.000	DAU
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (persen)	100	434.056.125	
3.25.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	-	400.378.725	
3.25.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	2	8.200.000	DAU
3.25.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	26.477.400	DAU
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	100	299.660.000	
3.25.01.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	2.000	3.060.000	DAU
3.25.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	10	140.000.000	DAU
3.25.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	8	156.600.000	DAU
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (persen)	100	115.700.000	
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	23	74.210.000	DAU
3.25.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	5	2.500.000	DAU
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5	13.990.000	DAU
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	25.000.000	DAU

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Renja.

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka pada tahun 2022, Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan sebanyak lima program yang akan diakselarasikan dengan visi misi Bupati terpilih serta RPJP Kabupaten Luwu Timur.

Renja merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Renja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi,

regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Malili, Juni 2021

KEPALA DINAS,



A.R. SALIM, S.Sos., MM.

Pkt : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip. 19651105 198703 1 015

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN I
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2022

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	2		3	5	6
	BELANJA				13.294.341.451	BELANJA				11.945.440.459
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.430.013.575	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.226.920.143
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8.430.013.575	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.226.920.143
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Produksi perikanan tangkap (ton)	10.165,90	2.184.225.525	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Produksi perikanan tangkap (ton)	10.165,90	3.374.525.525
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100	1.822.877.160	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100	2.688.577.160
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen)	1	22.877.160	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen)	1	22.877.160
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap (unit) KP 1	2	400.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap (unit) KP 1	2	2.600.000.000
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (kelompok) KP 1	15	1.400.000.000	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (kelompok) KP 1	15	65.700.000
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100	161.348.365	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100	161.348.365
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kecamatan	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (kelompok)	20	76.105.295	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kecamatan	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (kelompok)	20	76.105.295
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kecamatan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok)	12	69.922.525	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kecamatan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok)	12	69.922.525
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (persil)	80	15.320.545	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (persil)	80	15.320.545
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kecamatan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	57	200.000.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kecamatan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	57	524.600.000
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kecamatan	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit)	1	200.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kecamatan	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit)	1	524.600.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	2		3	5	6
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kecamatan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315.565	4.947.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kecamatan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315.565	3.268.093.513
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kecamatan	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen)	60	217.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kecamatan	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen)	60	162.308.033
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Kecamatan	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	30	100.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Kecamatan	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	30	53.910.430
3.25.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan	Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan (persil)	100	17.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan	Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan (persil)	100	17.265.783
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD (kelompok)	30	100.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD (kelompok)	30	91.131.820
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kecamatan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100	4.730.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kecamatan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100	3.105.785.480
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (dokumen)	4	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (dokumen)	4	195.446.000
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Prasarana di BBI yang di bangun/rehab (unit)	3	760.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Prasarana di BBI yang di bangun/rehab (unit)	3	300.000.000
		Kecamatan	Jumlah Jembatan tambak yang disediakan (unit) (KP 1)	4	800.000.000		Kecamatan	Jumlah Jembatan tambak yang disediakan (unit) (KP 1)	3	400.000.000
		Kecamatan	Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun dan ditingkatkan (Km) (KP 1)	6	600.000.000		Kecamatan	Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun dan ditingkatkan (Km) (KP 1)	5	500.000.000
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (kelompok) (KP1)	20	2.000.000.000	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (kelompok) (KP1)	20	1.500.000.000
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang)	30	200.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang)	30	44.174.875
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kecamatan	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor)	80.000	170.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kecamatan	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor)	80.000	166.164.605

KODE	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	2		3	5	6
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kecamatan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan- perundangan yang berlaku (persen)	94	50.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kecamatan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan- perundangan yang berlaku (persen)	94	74.000.000
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Kecamatan	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100	50.000.000	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Kecamatan	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100	74.000.000
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Kecamatan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali)	24	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Kecamatan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali)	24	74.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kecamatan	Produksi hasil pengolahan ikan (ton)	322	1.248.788.050	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kecamatan	Produksi hasil pengolahan ikan (ton)	322	510.301.105
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100	338.538.050	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100	238.538.050
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	4	338.538.050	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	4	238.538.050
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)	83	120.250.000	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)	83	86.925.550
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali)	5	120.250.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali)	5	86.925.550
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)	55	790.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)	55	184.837.505
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	5	790.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	5	184.837.505

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	2		3	5	6
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (persen)	100	4.864.327.876	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (persen)	100	4.718.520.316
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (persen)	100	86.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (persen)	100	74.922.874
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	31.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	29.478.533
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	1	4.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	1	3.500.000
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	3.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	3.500.000
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	1	4.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	1	4.000.000
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	3.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	4.000.000
3.25.01.2.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	40.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	30.444.341
3.5.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen)	100	3.685.627.876	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen)	100	3.222.259.876
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	31	3.613.482.386	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	31	3.152.114.386
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	72.145.490	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	70.145.490
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (persen)	100	22.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (persen)	100	21.894.801
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (dokumen)	4	22.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (dokumen)	4	21.894.801
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (persen)	100	7.000.000	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (persen)	100	6.841.245
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen)	4	7.000.000	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen)	4	6.841.245
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	116.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	132.150.920
3.25.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	-	37.900.000
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perikanan	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	26.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perikanan	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	24.910.920
3.25.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi (orang)	7	30.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi (orang)	7	23.750.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	2		3	5	6
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	7	30.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	7	23.040.000
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	7	30.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	7	22.550.000
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	481.700.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	411.034.475
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	12	7.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	12	6.832.575
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	4	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	4	3.000.000
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	21	4.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	21	3.841.900
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	4	8.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	4	7.660.000
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	48	6.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	48	6.100.000
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	160	3.600.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	160	3.600.000
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	200	450.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	200	380.000.000
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (persen)	100	36.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (persen)	100	434.056.125
3.25.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	-	400.378.725
3.25.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	2	10.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	2	8.200.000
3.25.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	26.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	25.477.400
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	100	314.300.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	100	299.660.000
3.25.01.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	2.000	3.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	2.000	3.060.000
3.25.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	10	154.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	10	140.000.000
3.25.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	8	156.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	8	156.600.000
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (persen)	100	115.700.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (persen)	100	115.700.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	2		3	5	6
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	23	74.210.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	23	74.210.000
3.25.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	5	2.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Dinas Perikanan	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	5	2.500.000
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5	13.990.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5	13.990.000
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	25.000.000